

# PENGUNAAN SISTEM REKAPITULASI SUARA PADA PEMILU 2024 DI TPS 077 KOTA PALANGKA RAYA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL

Fitri Gayah Sari<sup>1</sup>, Sadar Sadar<sup>2</sup>, Widya Rahmat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

E-mail: fitrigayahsariiii01@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

E-mail: sadarbahtiar@umpr.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

E-mail: widyarahmat@umpr.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) pada Pemilu 2024 di TPS 077 Kelurahan Bukit Tunggul, Kota Palangka Raya yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris, studi ini menganalisis implementasi SIREKAP berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan fenomena sosial yang terjadi selama pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIREKAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu, implementasinya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan komprehensif, masalah teknis seperti server *error*, dan ketidaksiapan infrastruktur di beberapa daerah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pelatihan petugas, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk optimalisasi penggunaan SIREKAP di masa depan.

**Keywords: SIREKAP; Pemilu; Palangka Raya**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD NKRI 1945. Menurut prinsip demokrasi Indonesia, menyatakan bahwa suatu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan cara untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu yang terpenting dalam kehidupan demokrasi suatu negara, dimana melalui pemilu warga negara menentukan untuk eksekutif maupun legislatif. Tidak terkecuali di Indonesia, Pemilu terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sebagai bagian terpenting dalam proses peningkatan kualitas dan integritas berdemokrasi. Sebagai satu unsur penting dalam demokrasi dimana prosesnya harus dilakukan secara transparan dan akurat, maka penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada beberapa tahun terakhir, teknologi informasi telah menjadi bagian terpenting dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan oleh KPU adalah penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara atau yang lebih dikenal dengan SIREKAP. Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) merupakan sebuah sistem digital yang dirancang untuk mempercepat proses pengumpulan dan perhitungan suara

**Fitri Gayah Sari<sup>1</sup>, Sadar Sadar<sup>2</sup>, Widya Rahmat<sup>3</sup>**

dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat nasional. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan manusia yang sering terjadi pada proses manual serta mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu. Namun penggunaan SIREKAP pada pemilihan umum sebelumnya masih menghadapi beberapa kendala, khususnya pada pemilu serentak pada tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada TPS 077 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya merupakan salah satu penggunaan aplikasi SIREKAP. Namun, implementasi SIREKAP di wilayah ini juga tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang umumnya dihadapi oleh banyak TPS lainnya. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan dalam pelatihan petugas pengguna SIREKAP, jaringan internet yang tidak stabil, perangkat *handphone* yang tidak memadai, kekuatan daya server yang tidak stabil. Selain itu, kesalahan dalam hasil penginputan data seperti C Hasil yang tidak bisa membaca hasil inputan sehingga menghasilkan jumlah suara yang keluar di aplikasi tidak sama dengan C Hasil yang ada dan keterlambatan dalam pengumuman hasil pemilu.

Pada penelitian ini dilakukan kajian kepustakaan dari penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan acuan sebagai kebaruan dalam penelitian ini adapun penelitian sebelumnya yaitu, Gauru, dkk (2022) Implementasi SIREKAP dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIREKAP berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Kelebihan utama dari SIREKAP adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. Namun, kelemahan yang ditemukan meliputi kebutuhan akan jaringan internet yang memadai, perangkat teknologi yang spesifik, serta kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan teknologi yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perbaikan pada sumber daya alam, infrastruktur pemilu, dan fasilitas pendukung pemilu untuk mengoptimalkan implementasi SIREKAP di masa depan. Selanjutnya penelitian Inzana dkk (2024) Inovasi SIREKAP dalam meningkatkan Partisipasi Politik, menyoroti betapa pentingnya inovasi teknologi dalam memperkuat partisipasi politik di Indonesia, dalam penelitiannya menggaris bawahi bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan akurasi dalam proses pemilihan umum.

Penelitian tersebut menemukan bahwa SIREKAP membantu mengurangi kesalahan manusia dalam rekapitulasi manual dan mempercepat proses penghitungan suara. Namun, Inzana dkk juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIREKAP, termasuk keterbatasan akses teknologi, kurangnya literasi digital di kalangan pemilih, dan kecurigaan terhadap integritas data yang dikelola oleh sistem ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pelatihan teknis bagi petugas pemilu serta edukasi politik yang lebih luas kepada masyarakat. Penelitian Inzana memberikan dasar yang kuat bagi studi selanjutnya, termasuk penelitian ini, dalam mengeksplorasi bagaimana inovasi dalam SIREKAP dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi politik. Kedua, peneliti sepakat bahwa meskipun SIREKAP memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pemilu, tantangan-tantangan teknis dan sosial yang dihadapi harus diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkamiden (2024) dengan judul *SiRekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia*, penelitian ini menyoroti aspek krusial dari implementasi teknologi dalam pemilihan umum, khususnya melalui penggunaan Sistem Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP). Nurkamiden mengkaji tantangan utama dan potensi kekeliruan yang mungkin muncul dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu Serentak 2024, yang pertama kali akan menggunakan SIREKAP sebagai alat bantu digital. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun SIREKAP berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, ada sejumlah tantangan signifikan. Pertama, luasnya wilayah geografis Indonesia yang berbeda-beda, terutama di daerah terpencil, menimbulkan kendala infrastruktur teknologi. Kedua, kapasitas SDM penyelenggara Pemilu yang belum sepenuhnya memahami sistem ini menjadi hambatan dalam implementasi yang optimal. Selain itu, potensi kekeliruan, seperti serangan siber dan kesalahan penginputan data oleh petugas KPPS, juga menjadi perhatian utama dalam memastikan integritas data dan keamanan proses pemilu. Penelitian Nurkamiden memberikan pandangan yang komprehensif mengenai risiko yang mungkin dihadapi dalam penggunaan SIREKAP pada Pemilu 2024, serta menawarkan analisis berbasis perundang-undangan, historis, dan kasus yang relevan. Studi ini menjadi fondasi penting bagi penelitian lain yang membahas implementasi teknologi dalam pemilu, termasuk penelitian yang menyoroti pentingnya pengembangan SDM, penguatan infrastruktur, dan mitigasi risiko teknologi untuk mendorong transparansi dan keandalan dalam pemilu di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chaverlin, dkk (2022) *Implementasi Aplikasi SIREKAP pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020*, mengeksplorasi penerapan teknologi informasi melalui aplikasi SIREKAP dalam proses rekapitulasi suara. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun SIREKAP berfungsi sebagai alat bantu dan sarana publikasi hasil rekapitulasi suara, implementasinya pada Pilkada Kota Manado 2020 belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini memberikan wawasan awal tentang tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi rekapitulasi suara di tingkat lokal, yang berkontribusi pada literatur yang membahas kesiapan teknologi dalam pemilu di Indonesia. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pradesa (2024) *Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024*, hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi penghitungan suara serta mempercepat pengumuman hasil. Namun, ada tantangan serius terkait keamanan data, transparansi, dan ancaman terhadap integritas pemilu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara umum penelitian terdahulu tidak menunjukkan masalah yang terlalu signifikan dalam penelitian ini. Meskipun demikian terdapat satu penelitian terdahulu yang mendekati permasalahan yang hendak di kaji, penelitian tersebut dilakukan oleh Nurkamiden (2024) yang dalam kajiannya

**Fitri Gayah Sari<sup>1</sup>, Sadar Sadar<sup>2</sup>, Widya Rahmat<sup>3</sup>**

berhasil menunjukkan aspek-aspek penting yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi acuan utama dalam pengembangan kerangka penelitian ini, karena pendekatannya sejalan dengan tujuan peneliti untuk memperdalam analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara pada Pemilu 2024 di TPS 077 Kota Palangka Raya Kelurahan Bukit Tunggal.

Pada penelitian ini diidentifikasi sebuah masalah yaitu belum optimalnya penggunaan sistem rekapitulasi suara (SIREKAP) dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengaplikasian SIREKAP. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendalami dua aspek penting terkait penggunaan sistem rekapitulasi suara (SIREKAP) dalam pemilu 2024 di Kelurahan Bukit Tunggal TPS 077 Kota Palangka Raya. Pertama, jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP). Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penggunaan sistem rekapitulasi suara (SIREKAP) dalam pemilu 2024 di Kelurahan Bukit Tunggal, TPS 077, Kota Palangka Raya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris, data yang di peroleh dari penelitian ini melalui analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 dan berbagai fenomena sosial yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS 077 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Hasil analisis ini di bandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan serta hasil analisis tersebut dibandingkan lagi dengan penelitian terdahulu.

## **PEMBAHASAN**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu merupakan perkembangan positif bagi penerapan sistem pemilu di Indonesia yang terus berkembang. Teknologi informasi telah mempercepat, menyederhanakan, dan membuat proses pemilu menjadi lebih transparan, mulai dari tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara dan publikasi hasil pemilu. Selain kemajuan teknologi, berbagai inovasi juga dilakukan antara lain penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP), inovasi ini memudahkan masyarakat untuk memantau hasil pemilu.

### **Kendala yang dihadapi**

#### **1. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman**

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat, khususnya dalam hal tingkat

pendidikan dan pengalaman. Berdasarkan hasil temuan, meskipun mayoritas SDM yang dilibatkan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, namun tingkat pengalaman mereka dalam penyelenggaraan pemilu masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada aspek yang memerlukan keterampilan teknologi. Sebagian besar petugas, terutama di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kurang memahami penggunaan teknologi yang kini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, seperti sistem rekapitulasi suara. Minimnya pengalaman ini berdampak pada efisiensi dan keakuratan proses dan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan teknis pemilu.

Selain itu faktor usia juga menjadi perhatian, banyak petugas KPPS yang berusia lanjut dan seharusnya tidak lagi bertugas mengingat beban fisik dan mental yang cukup tinggi selama proses pemilu. Usia yang tidak lagi produktif dapat mempengaruhi kinerja dan daya tanggap petugas, terutama dalam menghadapi situasi yang memerlukan ketelitian dan keputusan cepat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat tantangan Pemilu 2024 yang semakin kompleks dan membutuhkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta tuntutan profesionalisme yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti pelatihan intensif yang berkelanjutan bagi SDM penyelenggara pemilu, baik dalam hal keterampilan teknologi maupun manajemen pemilu secara umum. Selain itu, perlu dipertimbangkan bagaimana rekrutmen petugas yang lebih muda dan memiliki kapasitas lebih baik dalam menghadapi tantangan teknis dan operasional pemilu modern. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan meminimalkan potensi masalah di lapangan.

## **2. Pelatihan dan Pembinaan**

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada para petugas pemilu. Berdasarkan temuan, pelatihan yang diberikan belum memadai untuk membekali SDM dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan pemilu modern yang semakin kompleks. Pelatihan yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman teknis dan operasional mengenai tugas-tugas pemilu, seperti penggunaan teknologi pemilu, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, ternyata tidak diberikan secara menyeluruh. Banyak petugas melaporkan bahwa durasi pelatihan terlalu singkat dan materinya tidak mencakup seluruh aspek penting yang dihadapi di lapangan. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga dirasakan kurang efektif, di mana beberapa materi disampaikan secara monoton dan tidak disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta yang beragam.

Hal ini mengakibatkan banyak petugas yang masih kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Kelemahan dalam pelatihan ini berdampak pada kesiapan petugas di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan teknologi. Di beberapa

**Fitri Gayah Sari<sup>1</sup>, Sadar Sadar<sup>2</sup>, Widya Rahmat<sup>3</sup>**

daerah, SDM penyelenggara pemilu melaporkan adanya kebingungan saat menghadapi permasalahan teknis di hari pemilihan, seperti gangguan alat elektronik dan kesulitan dalam pengelolaan data pemilih. Selain itu, pembinaan yang berkelanjutan juga tidak diterapkan dengan baik. Idealnya, pembinaan dilakukan secara periodik untuk memperkuat dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan petugas, terutama dalam menanggapi perubahan regulasi atau perkembangan teknologi pemilu. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar petugas hanya mendapatkan pelatihan satu kali sebelum pemilu, tanpa adanya pembinaan lanjutan atau evaluasi yang memadai.

Kekurangan dalam pelatihan dan pembinaan ini jelas menghambat efektivitas dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam program pelatihan dan pembinaan SDM pemilu. Pertama, pelatihan harus diperpanjang dan diperluas cakupannya, mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga simulasi-simulasi praktis yang dapat meningkatkan kesiapan petugas. Kedua, metode pelatihan harus disesuaikan dengan berbagai tingkat pemahaman dan kemampuan peserta, menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan melibatkan teknologi modern. Ketiga, pembinaan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan SDM selalu siap menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul di setiap penyelenggaraan pemilu. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga potensi kesalahan dan keterlambatan dapat diminimalkan, serta proses pemilu dapat berjalan lebih lancar dan akurat.

### **3. Server Error**

Salah satu kendala krusial yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah server error, yang mengakibatkan ketidaksesuaian data hasil pemilu yang ditampilkan dengan hasil yang seharusnya tertera pada formulir C hasil KWK dalam aplikasi. Permasalahan ini berdampak signifikan pada integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilu, mengingat teknologi yang seharusnya mendukung akurasi dan efisiensi justru mengalami gangguan. Server error tersebut muncul pada saat pengolahan dan pengunggahan data hasil pemungutan suara ke dalam sistem. Berdasarkan temuan, beberapa faktor yang memicu terjadinya error antara lain adalah ketidakstabilan jaringan, kapasitas server yang tidak memadai untuk menangani lonjakan data pada hari pemilihan, dan adanya bug dalam aplikasi yang digunakan untuk merekap hasil suara. Hal ini menyebabkan hasil yang diunggah dalam aplikasi seringkali tidak sesuai dengan data yang dicatat secara manual dalam formulir C hasil KWK, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap validitas hasil pemilu.

Ketidakesuaian data ini juga menimbulkan tantangan bagi petugas pemilu di lapangan yang harus menghadapi keluhan dan protes dari saksi partai politik maupun masyarakat. Beberapa daerah melaporkan bahwa mereka harus melakukan pengulangan proses input data karena ketidaksesuaian hasil yang terdeteksi, yang tentunya memakan waktu dan menghambat proses

rekapitulasi secara keseluruhan. Selain itu, server error tersebut berpotensi memperlambat proses pengumuman hasil pemilu, yang bisa meningkatkan kecurangan dalam pemilihan umum dan ketidakpuasan dari berbagai pihak yang terlibat.

Dari sisi teknis, kekurangan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi pemilu menjadi sorotan. Kapasitas server yang terbatas dan kurangnya uji coba terhadap aplikasi pemilu sebelum hari pemilihan turut memperbesar risiko kegagalan sistem. Dalam situasi seperti ini, keandalan sistem sangat penting untuk menjaga kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara secara real-time. Kendala server error ini menimbulkan masalah serius terhadap kredibilitas pemilu, di mana ketidaksesuaian data hasil dapat menimbulkan kecurigaan akan manipulasi atau kesalahan dalam perhitungan suara.

Untuk mengatasi masalah ini perlu diperhatikan bagaimana peningkatan dalam berbagai aspek, seperti:

a. Peningkatan kapasitas dan keandalan server

Perlu adanya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur teknologi, khususnya dalam memperkuat kapasitas server agar mampu menampung dan memproses data dalam jumlah besar secara bersamaan tanpa mengalami kegagalan sistem.

b. Pengujian sistem secara menyeluruh

Sebelum digunakan secara resmi, aplikasi pemilu dan sistem server harus melalui serangkaian uji coba skala besar untuk mengidentifikasi potensi bug dan ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Pengujian harus mencakup skenario-skenario terburuk yang mungkin dihadapi selama proses pemilu.

c. Pemantauan dan dukungan teknis real-time

Perlu ada tim teknis yang siap siaga selama periode pemilu untuk memantau dan segera menanggulangi jika terjadi error pada server. Pemantauan ini juga dapat dilengkapi dengan alat yang mendeteksi potensi masalah sebelum berdampak luas.

d. Pelatihan bagi petugas teknis

Selain memperkuat infrastruktur, petugas pemilu di lapangan juga perlu dibekali dengan pelatihan yang komprehensif terkait troubleshooting dan prosedur jika terjadi masalah teknis seperti server error. Dengan implementasi langkah-langkah di atas, diharapkan server error dapat diminimalisir pada pemilu mendatang, sehingga proses penghitungan suara menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

### **Efektivitas Penggunaan SIREKAP**

Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) di sebagian besar wilayah, terutama di kota-kota yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik, akan sangat mempercepat proses pemilu. Namun di beberapa daerah tertentu keterbatasan jaringan internet masih menjadi kendala

**Fitri Gayah Sari<sup>1</sup>, Sadar Sadar<sup>2</sup>, Widya Rahmat<sup>3</sup>**

sehingga mempengaruhi penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP). Dibandingkan dengan rekapitulasi manual, Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Namun banyak kasus kesalahan input data yang ditemukan oleh petugas pemilu karena kurangnya pelatihan teknis dan kesalahan manusia. Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) memungkinkan publik menyaksikan proses secara online melalui platform KPU. Masyarakat dapat melihat hasil pemilu secara real time sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Namun, ada kekhawatiran mengenai keamanan data dan kemungkinan peretasan yang akan terjadi.

Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penghitungan suara, terutama di bidang yang melibatkan teknologi. Namun, terdapat tantangan besar dalam hal infrastruktur teknis dan sumber daya manusia. Di daerah yang koneksi internetnya masih terbatas, penggunaan SIREKAP kurang optimal dan dapat menghambat terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil di seluruh Indonesia. Selain itu, literasi digital para pejabat terpilih dan masyarakat akan berperan penting dalam keberhasilan implementasi Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP). Pelatihan lebih lanjut diperlukan agar petugas pemilu dapat menggunakan sistem ini dengan benar, sementara sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk lebih memahami manfaat dan fungsi Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP). Kepercayaan masyarakat merupakan persoalan yang sangat penting, meskipun Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) memberikan kejelasan, kekhawatiran mengenai keamanan data dan manipulasi digital masih menjadi tantangan yang harus diatasi oleh penyelenggara pemilu, pemerintah dan KPU harus memberikan jaminan keamanan sistem dengan meningkatkan langkah-langkah keamanan siber.

Pada penelitian terkait ketepatan program membangun rumah rakyat (membara) yang sudah Cukup Tepat tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Harwijaya S.T M.S.P selaku sekretaris dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman saat dijumpai di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah. Program membara ini sudah cukup tepat karena yang menerima adalah masyarakat yang sangat layak mendapatkan bantuan seperti ini karena kondisi rumah mereka yang hampir tidak layak lagi. Pada prosedur pengajuan usulan calon penerima bantuan Rumah Layak Huni juga hampir tidak ditemukan masalah, namun hal ini tetap perlu menjadi perhatian, karena prosedur yang salah, kurang cermat, atau tidak prosedur, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya salah sasaran sehingga mengakibatkan gagalnya tujuan dari pada kebijakan ini.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 di TPS 077 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya, menandai langkah signifikan dalam modernisasi proses pemilihan umum di Indonesia. Meskipun sistem ini menjanjikan peningkatan efisiensi dan transparansi, implementasinya tidak luput dari berbagai tantangan yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini menunjukkan bahwa SIREKAP memiliki potensi besar dalam mempercepat penghitungan suara dan

meningkatkan akurasi hasil, namun implementasinya terhambat oleh kurangnya kesiapan sumber daya manusia, pelatihan yang tidak memadai, serta masalah teknis seperti server error. Meski demikian, sistem ini berhasil meningkatkan transparansi dengan menampilkan hasil secara *real-time*, meskipun masih terdapat kekhawatiran terkait keamanan data. Untuk mengatasi kendala ini, rekomendasi meliputi peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengujian sistem yang lebih menyeluruh sebelum digunakan. Dengan perbaikan yang tepat, SIREKAP memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi pemilu di Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan yang ada dan membangun kepercayaan publik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi SIREKAP Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12.2 (2022): 224-230.
- Nurkamiden, Mario. "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2024): 101-110.
- Nur Inzana, Andy Arya Maulana, & Putri Mawang Sari (2024) Inovasi Sirekap dalam meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, vol.5 no.2 (2024) <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 47-57.
- Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *Governance*, 2(1).
- Hardiyanti, M., Pratama, P. A., Saputra, A. D., & Sholehah, M. M. A. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249-271.
- Hidayat, F. I. (2022). Efektivitas Organisasi dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Haryadi, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2022). Implementing "SIREKAP" Application Based on Election for Improving the Integrity of Election Administrators and Increasing Public Trust. In *Human Interaction, Emerging Technologies and Future Systems V: Proceedings of the 5th International Virtual Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, IHMET 2021, August 27-29, 2021 and the 6th IHMET: Future Systems (IHMET-FS 2021), October 28-30, 2021, France* (pp. 159-165). Springer International Publishing.
- Y. A. Majid, A. M. Carera, and T. Trilia, "Media Komik Edukasi Dan Video Animasi Sebagai Media Promosi Kesehatan Tentang Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar," *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, vol. 5, no. 1, Feb. 2020.
- Sadar. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 47-54.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang – Undang Nomor 66 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.